

## **ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SURABAYA**

**Oleh :  
Muchtolifah**

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the effect the number of firms, the rate of inflation, the number of hotels, and the amount of labor to the Local Revenue (PAD) in Surabaya.

Source data used are secondary data obtained from BPS Prov. East Java for 15 years from 1994 to 2008. The data were analyzed using multiple linear regression model is an analysis to determine each of the independent variable on the dependent variable either simultaneously or partially.

The results of data analysis shows that the variable number of the Company, Inflation Rate, Number of Hotels and Total Electricity Customers simultaneously significant effect on PAD city of Surabaya. While the partial amount of electricity customers significant effect on PAD city of Surabaya. While the number of firms, the rate of inflation and the number of hotels did not significantly affect the city of Surabaya PAD because the government is not fully in carrying out a policy for economic conditions can be stable and that no complicated licensing process so that investors can invest their capital di Surabaya.

*Keywords: PAD, Total Company, Inflation Rate, Number of hotel, number of electricity customers*

### **INTISARI**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah perusahaan, tingkat inflasi, jumlah hotel, dan jumlah tenaga kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Surabaya.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Prov. Jawa Timur selama 15 tahun mulai 1994 – 2008. Data yang dianalisis menggunakan model Regresi Linier berganda yaitu suatu analisis untuk mengetahui masing-masing dari variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan maupun secara parsial.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Jumlah Perusahaan, Tingkat Inflasi, Jumlah Hotel dan Jumlah Pelanggan Listrik secara simultan berpengaruh nyata terhadap PAD dikota Surabaya. Sedangkan secara parsial jumlah pelanggan listrik berpengaruh nyata terhadap PAD dikota Surabaya. Sedangkan jumlah perusahaan, tingkat inflasi dan jumlah hotel tidak berpengaruh nyata terhadap PAD dikota Surabaya karena pemerintah belum sepenuhnya dalam menjalankan suatu kebijakan agar kondisi perekonomian bisa stabil dan proses perijinan yang tidak rumit sehingga para investor dapat menanamkan modalnya di Surabaya.

**Kata Kunci :** *PAD, Jumlah Perusahaan, Tingkat Inflasi, Jumlah Hotel, Jumlah Pelanggan listrik .*

---

**Muchtholifah**, Dosen Ekonomi Pembangunan FE- UPNV Jawa Timur.  
Jl. Raya Tempel No.5 A Gempol – Pasuruan – Jatim  
Telp.0811370481.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. (Siagian, 1985:12)

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional maka pembangunan diberbagai sektor haruslah seiring dan seimbang dengan demikian akan timbul pemerataan, sehingga akan menimbulkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan nasional. Apabila pemerataan pembangunan tidak merata akan menimbulkan kecemburuan sosial antara golongan ekonomi lemah dengan ekonomi kuat, maka akan terjadi goncangan-goncangan ekonomi yang menghambat pembangunan. Maka perlu diciptakan kondisi nasional yang memberikan rangsangan dan peluang seluas-luasnya bagi semua potensi untuk berprestasi dan berpartisipasi, salah satu potensi pembangunan tersebut adalah peningkatan pembangunan daerah. Untuk mencapai keberhasilan daerah itu sendiri agar menjadikan pembangunan yang benar-benar utuh perlu diusahakan pola adanya keselarasan antara perencanaan sektoral dan perencanaan regional sehingga sasaran-sasaran nasional dapat tercapai dengan baik, serta disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. (Anonim, 1997:79)

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang perubahan paradigma itu antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan diatur undang-undang no.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang-undang no 25 tahun 1999 tentang pertimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. (Suparmoko, 2000:97)

Untuk mempercepat pembangunan didaerah maka pemerintah pusat telah memberikan hak otonomi pada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Pemberian hak otonomi pada pemerintah daerah ini didasarkan pada tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam garis-garis besar haluan Negara tahun 1998 yaitu; a.Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, b.Menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, c.Meningkatkan pendaayaan potensi daerah secara optimal.

Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat memberikan manfaat agar tiap - tiap daerah bisa membiayai kehidupan daerahnya dengan perolehan hasil daerah baik berupa Restribusi, Pajak pendapatan, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain. Atas dasar pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keseluruhan daerah sebagai suatu kesatuan wilayah kehidupan maupun kehidupan setiap individu anggota masyarakat karena pelaksanaan pembangunan nasional berada didaerah, maka rencana pembangunan daerah merupakan bagian dari kerangka umum pola pembangunan nasional dan daerah haruslah saling menunjang. (Anonim, 2006:3)

Salah satu aspek penting dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran dan penerimaan daerah. Karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi masing-masing daerah yang memiliki kekayaan masing-masing daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, ataupun

daerah yang intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi maupun rendah. Ini semua berdampak kepada besar tidaknya basis pajak di daerah-daerah bersangkutan. Disisi lain, daerah – daerah juga sangat bervariasi dilihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi pelayanan publik. Ada daerah-daerah dengan yang berbentuk kepulauan luas, dimana sarana prasarana dan infrastruktur lainnya yang masih belum memadai. (Anonim,2008:2)

Sejak disahkannya undang-undang otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan segala potensi yang ada di daerah. Pembangunan ekonomi yang dimaksudkan untuk menggali sumber daya yang ada di daerah membutuhkan dana yang cukup besar. Di dalam TAP MPR No. IV/MPR/2000 ditegaskan bahwasanya “kebijakan desentralisasi Daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemda, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah”. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser ke Daerah baik melalui perluasan basis pajak maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan:

- 1).Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran.
- 2).Didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. (Haryanto,2006:2)

Tindakan pemerintah pusat dengan memberi kesempatan pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan daerah sendiri tanpa selalu harus menunggu keputusan dari pusat disebut dengan otonomi daerah, dengan otonomi daerah ini maka diharapkan pemerintah daerah lebih leluasa untuk membangun daerahnya dan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan daerahnya sehingga dapat ditangani dan dipenuhi dengan cepat. Perwujudan otonomi daerah dalam rangkai kegiatan pembangunan di daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dikembangkan secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendukung terlaksana kegiatan pembangunan di daerah Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka hal ini tidak dapat dilepaskan dari sumber – sumber pendapatan asli daerah Surabaya yang digunakan untuk pembiayaan daerah tersebut.

Menurut undang-undang nomer 32 tahun 2004 disebutkan bahwa sumber keuangan daerah berasal dari : hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD (pendapatan asli daerah) yang sah Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya selama lima tahun terakhir dari tahun 2000 adalah sebesar Rp 131.115.000; tahun 2001 Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sebesar Rp 208.238.135; tahun 2002 Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sebesar Rp 227.863.171; tahun 2003 Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sebesar Rp 348.310.014; tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sebesar Rp 327.554.638. (Anonim,2004:24)

Berdasarkan dari uraian latar belakang dari fakta-fakta tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membuktikan bahwa faktor – faktor yang terdiri dari jumlah industri besar, inflasi, jumlah hotel, jumlah pelanggan listrik, berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan seberapa besar pengaruh yang diberikan dari masing-masing faktor. Maka penulis berkeinginan menulis tentang pendapatan asli daerah kota

Surabaya yang berkenaan dengan sumber – sumbernya, pembangunan dan peranannya dalam mendukung serta otonomi daerah .

### **Otonomi Daerah**

Otonomi adalah suatu proses pembagian kekuasaan atau wewenang antara pusat dengan daerah dan diberlakukan mulai tanggal 1 januari 2001, dalam pembentukan daerah otonomi diperlukan kemampuan keuangan daerah yang memadai (Marihot ,2005:1)

Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suparmoko, 2000:18)

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari system dekosentrasi, otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat. (Widjaja,2001:76)

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten / kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah. (Istifadah, 2002:2)

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerjasama regional. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomis dan wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya mampu kepada masyarakat (Widjaja,2001:7)

jadi otonomi daerah diartikan sebagai pemberian hak dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerahnya berdasarkan atas prakarsa daerah sendiri.

### **Pengertian Pendapatan.**

Pendapatan merupakan faktor penting bagi setiap orang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang maka semakin banyak pula kebutuhan sehari-hari yang dapat dipenuhi oleh karena itu setiap Negara akan berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada pendapatan nasional . Ada beberapa pengertian tentang pendapatan yaitu diantaranya :

Pendapatan adalah jumlah dari seluruh uang yang diterima seorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa bunga dan deviden serta pembayaran atau penerimaan seperti tunjangan sosial atau asumsi pengangguran (Nordhaus,1993:58)

Pendapatan adalah barang atau jasa yang dapat dikonsumsi selama periode tertentu. Dengan demikian terlihat pendapatan mempunyai pengaruh terhadap konsumsi dan tabungan akan meningkat pula. (Winardi,1991:28)

Pendapatan merupakan jumlah seluruh uang yang diterima seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) pendapatan berasal dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, dan deviden serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran. (Mamesah, 1995:23)

Pendapatan daerah dapat didefinisikan sesuai dengan cara dari segi mana melihatnya, adapun definisi pendapatan daerah ditinjau dari beberapa segi antara lain:

- 1).Kalo ditinjau dari segi pendapatan, pendapatan daerah adalah merupakan jumlah pendapatan atau balas jasa yang terima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah itu yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu.
- 2).Atau apabila ditinjau dari segi pengeluaran, pengeluaran daerah adalah merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung. Konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap perubahan stok dan ekspor netto. (Anonim, 1993:19)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah pendapatan atau penerimaan yang bersumber dari potensi-potensi yang berasal dari daerah tersebut yang bertujuan untuk membiayai, mengatur dan mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri, dimana hal itu menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membangun daerah tersebut.

#### **Pengertian Pendapatan Asli Daerah.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan serta mengelola sumber-sumber keuangan daerah sendiri. Ada beberapa pengertian mengenai Pendapatan Asli Daerah antara lain :

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Sutrisno, 1995:201)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan sebagai suatu ukuran kasanggupan pajak didefinisikan dengan luas sebagai keuntungan ekonomis yang diterima seseorang selama suatu waktu dengan lebih tepat. (Dumairi, 1993:508)

Pendapatan Asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan. (Soehino, 1991:150) Pendapatan menggambarkan tingkat produksi yang dicapai dalam satu tahun tertentu atau perubahan dari turun temurun dimana mempunyai peranan penting dalam merubah tingkat kegiatan ekonomi dan kepesatan pertumbuhannya. (Sukirno, 1999:18)

Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai pendapatan rutin dari usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. Pendapatan asli daerah sangat diperlukan untuk lebih mempelancar dan meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah didaerah-daerah, maka dari itu tiap-tiap daerah selalu mangharapkan adanya peningkatan pendapatan daerah yang berate juga dapat lebih meningkatkan pembangunannya

#### **Sumber Perolehan Pendapatan Daerah.**

Sumber perolehan dana bagi pemerintah daerah itu bermacam-macam, berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1999, menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah berasal dari :

- 1).Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari; a. hasil pajak daerah, b. hasil retribusi daerah, c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang sah, d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 2).Dana perimbangan; a. Bagian daerah dari penerimaan dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. b. Dana alokasi umum. c. Dana alokasi khusus.
- 3).Pinjaman daerah.
- 4).Lain-lain penerimaan sah. (Anonim,1999:2)

### METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah perusahaan, tingkat inflasi, jumlah hotel, dan jumlah tenaga kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Surabaya

Variable penelitian terdiri dari Variabel terikat adalah pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang berasal dari sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dinas-dinas, bagian laba badan usaha milik daerah didaerah Surabaya. Besarnya pendapatan asli daerah dinyatakan dalam Ribuan Rupiah (Rp) pertahun.

Variabel Bebas terdiri dari; a. Variabel Jumlah Perusahaan yaitu banyaknya jumlah unit kegiatan dibidang ekonomi yang tergolong sektor sekunder dan pengukurannya dinyatakan dalam satuan unit. B. variabel Inflasi yaitu suatu proses kenaikan harga barang secara terus-menerus sehingga mengakibatkan melemahnya nilai mata uang dikota Surabaya pengukuran variabel ini dinyatakan dalam persen (%). c. Variabel jumlah Hotel yaitu banyaknya jumlah tempat penginapan para pengunjung, baik dihotel berbintang maupun tidak berbintang, variabel ini di ukur dengan satuan unit. d. Variabel jumlah pelanggan listrik yaituJumlah pelanggan listrik adalah banyaknya industri yang memanfaatkan jasa sambutan listrik yang dikelola oleh PT.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Prov. Jawa Timur selama 15 tahun mulai 1994 – 2008. Data yang dianalisis menggunakan model Regresi Linier berganda yaitu suatu analisis untuk mengetahui masing-masing dari variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan maupun secara parsial.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis ini digunakan analisis regresi linier berganda dan untuk mengolah data yang ada digunakan alat bantu komputer dengan program SPSS (*Statistic Program For Social Science*) versi 13.0.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -314359105 - 7062,204 X_1 - 589471,01 X_2 + 56909,133 X_3 + 905,505 X_4$$

Berdasarkan persamaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut:

$\beta_0$  = nilai konstanta sebesar -314359105 menunjukkan bahwa apabila faktor Jumlah Perusahaan ( $X_1$ ), Tingkat Inflasi ( $X_2$ ), Jumlah Hotel ( $X_3$ ), dan Jumlah Pelanggan Listrik ( $X_4$ ) konstan maka Pendapatan Asli Daerah turun sebesar Rp.314.359.105.

$\beta_1$  = -7062,204. menunjukkan bahwa faktor Jumlah Perusahaan ( $X_1$ ) berpengaruh negatif, dapat diartikan apabila Jumlah Perusahaan mengalami kenaikan satu unit maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar Rp.7.062.204.

- $\beta_2 = -589471,01$  menunjukkan bahwa faktor Tingkat Inflasi ( $X_2$ ) berpengaruh negatif, dapat diartikan apabila ada kenaikan Tingkat Inflasi satu persen maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami penurunan sebesar Rp.58.947.101.
- $\beta_3 = 56909,133$  menunjukkan bahwa faktor Jumlah Hotel ( $X_3$ ) berpengaruh positif, dapat diartikan apabila ada kenaikan Jumlah Hotel satu unit maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar Rp.56.909.133.
- $\beta_4 = 905,505$  menunjukkan bahwa faktor Jumlah Pelanggan Listrik ( $X_4$ ) berpengaruh positif, dapat diartikan apabila setiap ada kenaikan Jumlah Pelanggan Listrik satu unit maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp.905.505.

### Uji Hipotesis Secara Simultan

Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji F sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Varian (ANOVA)

Sumber Varian	Jumlah Kuadrat	Df	Kuadrat Tengah	F hitung	F tabel
Regresi	2E+017	4	4,177E+016	21,196	3,48
Sisa	2E+016	10	1,971E+015		
Total	2E+017	14			

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 1 diperoleh  $F_{hitung} = 21,196 > F_{tabel} = 3,48$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel bebas yaitu Jumlah Perusahaan ( $X_1$ ), Tingkat Inflasi ( $X_2$ ), Jumlah Hotel ( $X_3$ ), dan Jumlah Pelanggan Listrik ( $X_4$ ), berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ).

### Uji Hipotesis Secara Parsial

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas Jumlah Perusahaan ( $X_1$ ), Tingkat Inflasi ( $X_2$ ), Jumlah Hotel ( $X_3$ ), dan Jumlah Pelanggan Listrik ( $X_4$ ). Hasil penghitungan tersebut dapat dilihat dalam analisis sebagai berikut :

Tabel 2 : Hasil Analisis Variabel Jumlah Perusahaan, Tingkat Inflasi, Jumlah Hotel, Jumlah Pelanggan Listrik terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Variabel	Koefisien Regresi	Std. Error	t hitung	t tabel	$r^2$ Parsial
Jumlah Perusahaan ( $X_1$ )	-7062,204	3703.155	-1,907	2,228	0,266
Tingkat Inflasi ( $X_2$ )	-589471,01	692078.36	-0.852	2,228	0,067
Jumlah Hotel ( $X_3$ )	56909,133	718538.36	0,079	2,228	0,0006
Jumlah Pelanggan Listrik ( $X_4$ )	905,505	179.091	5,056	2,228	0,719

Variabel Terikat : Pendapatan Asli Daerah  
 Konstanta : 314359105  
 Koefisien Korelasi ( $R$ ) : 0,946      $R^2$  : 0,894

Sumber: Data diolah

Selanjutnya untuk melihat ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel terikatnya, dapat dianalisa melalui uji t dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pengaruh secara parsial antara Jumlah Perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan perhitungan diperoleh t-hitung sebesar  $-1,907 < t$ -tabel sebesar 2,228  $H_0$  diterima, pada level signifikan 5 %, sehingga secara parsial Faktor Jumlah Perusahaan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh secara nyata dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini didukung juga dengan nilai signifikansi dari Jumlah Perusahaan sebesar 0,086 yang lebih besar dari 0.05.

Nilai  $r^2$  parsial untuk variabel Jumlah Perusahaan sebesar 0,266 yang artinya bahwa Jumlah Perusahaan secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah sebesar 26,6 %, sedangkan sisanya 73,4 % tidak bisa dijelaskan oleh variabel tersebut.

**Pengaruh secara parsial antara Tingkat Inflasi ( $X_2$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)**

Berdasarkan perhitungan diperoleh t-hitung sebesar  $-0,852 < t$  tabel sebesar 2,228 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  di tolak, pada level signifikan 5 %, sehingga secara parsial Faktor Tingkat Inflasi ( $X_2$ ) tidak berpengaruh secara nyata negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). hal ini didukung juga dengan nilai signifikansi dari Tingkat Inflasi ( $X_2$ ) sebesar 0,414 yang lebih besar dari 0.05.

Nilai  $r^2$  parsial untuk variabel Tingkat Inflasi sebesar 0,067 yang artinya bahwa Tingkat Inflasi ( $X_2$ ) secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 6,7 %, sedangkan sisanya 93,3 % tidak mampu dijelaskan oleh variabel tersebut.

**Pengaruh secara parsial antara Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan perhitungan diperoleh t-hitung sebesar  $0,079 < t$  tabel sebesar 2,228 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  di tolak, pada level signifikan 5 %, sehingga secara parsial Faktor Jumlah Hotel ( $X_3$ ) tidak berpengaruh secara nyata positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). hal ini didukung juga dengan nilai signifikansi dari Jumlah Hotel ( $X_3$ ) sebesar 0,938 yang lebih besar dari 0.05.

Nilai  $r^2$  parsial untuk variabel Jumlah Hotel sebesar 0,0006 yang artinya Jumlah Hotel ( $X_3$ ) secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,06 %, sedangkan sisanya 99,94 % tidak mampu dijelaskan oleh variabel tersebut.

**Pengaruh secara parsial antara Jumlah Pelanggan Listrik terhadap PAD**

Berdasarkan perhitungan diperoleh t-hitung sebesar  $5,056 > t$  tabel sebesar 2,228 maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, pada level signifikan 5 %, sehingga secara parsial Faktor Jumlah Pelanggan Listrik ( $X_4$ ) berpengaruh secara nyata positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). hal ini didukung juga dengan nilai signifikansi dari Jumlah Pelanggan Listrik ( $X_4$ ) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0.05.

Nilai  $r^2$  parsial untuk variabel Jumlah Pelanggan Listrik sebesar 0,719 yang artinya Jumlah Pelanggan Listrik ( $X_4$ ) secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 71,9 %, sedangkan sisanya 28,1 % tidak mampu dijelaskan oleh variabel tersebut.

Kemudian untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh paling dominan empat variabel bebas terhadap Pendapatan Asli Daerah di Surabaya: Jumlah Perusahaan ( $X_1$ ), Tingkat Inflasi ( $X_2$ ), Jumlah Hotel ( $X_3$ ), dan Jumlah Pelanggan Listrik ( $X_4$ ) dapat diketahui dengan melihat koefisien determinasi parsial yang paling besar, dimana dalam



perhitungan ditunjukkan oleh variabel Jumlah Pelanggan Listrik dengan koefisien determinasi parsial ( $r^2$ ) sebesar 0,717 atau sebesar 71,7 %.

### **Pembahasan**

Dengan melihat hasil regresi yang didapat maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk Pendapatan Asli Daerah :

Jumlah Perusahaan tidak berpengaruh secara nyata (tidak signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena untuk saat ini banyak prosedur perijinan yang terkait dengan investasi yang relative lebih lama dan cukup rumit sehingga banyak perusahaan yang mengurungkan niatnya untuk mendirikan perusahaan dan iklim ketenagakerjaan yang kurang kondusif mungkin disebabkan karena krisis financial yang melanda maupun naiknya harga BBM sehingga banyak perusahaan memutuskan untuk mengurangi pegawai bahkan sampai perusahaan tersebut gulung tikar.

Tingkat Inflasi tidak berpengaruh secara nyata (tidak signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena apabila tingkat inflasi turun maka harga – harga barang dan jasa juga akan turun tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi permintaan masyarakat akan barang dan jasa meningkat dikarenakan masih banyaknya kebutuhan yang lain yang lebih penting atau lebih di dahulukan.

Jumlah Hotel tidak berpengaruh nyata (tidak signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena untuk saat ini banyak prosedur perijinan yang terkait dengan investasi yang relative lebih lama dan cukup rumit sehingga banyak pembangunan hotel yang berhenti selain itu banyak persaingan di dalam penginapan antara hotel dengan apartemen sehingga Pendapatan bukan hanya dihasilkan dari hotel melainkan ada dari apartemen yang lagi ramai untuk saat ini, ini jika dilihat dari penerimaan pendapatan daerah dari segi penginapan.

Jumlah Pelanggan Listrik berpengaruh nyata (signifikan) terhadap Pendapatan Asli Daerah . Hal ini disebabkan karena listrik untuk sekarang ini bukan lagi sebagai kebutuhan terisier namun sudah menjadi kebutuhan utama, bahkan bisa menjadi kebutuhan pokok untuk menunjang aktivitas ekonomi sehingga permintaan terhadap sambungan listrik tidak terbatas yang akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Jumlah Perusahaan, Tingkat Inflasi, Jumlah Hotel dan Jumlah Pelanggan Listrik secara simultan berpengaruh nyata terhadap PAD dikota Surabaya. Sedangkan secara parsial jumlah pelanggan listrik berpengaruh nyata terhadap PAD dikota Surabaya. Sedangkan jumlah perusahaan, tingkat inflasi dan jumlah hotel tidak berpengaruh nyata terhadap PAD dikota Surabaya.

### **Saran**

Pemerintah membuat kebijakan moneter agar menjaga tingkat Inflasi agar tetap stabil agar banyak pengusaha industri kecil maupun investor yang menanamkan modalnya.

Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan proses perizinan agar yang tidak rumit agar lebih banyak lagi Investor maupun pengusaha untuk menanamkan modalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2002-2006. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur*, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.-----, 2001-2004. *Jawa Timur Dalam Angka*, Surabaya: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- Arsyad, Lincolin. 1992. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kedua*, Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- As'ad, 2001. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pengusaha di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Daerah Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*, Fakultas Ekonomi UPN"Veteran" Jatim. Surabaya.
- Boediono. 1995. *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- , 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Hermawati, 2000. *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Lingkungan Industri Kecil Kulit di Kabupaten Magetan*, Fakultas Ekonomi UPN"Veteran" Jatim. Surabaya.
- Jaya, Kirana W, 2001. *Ekonomi Industri, Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kurniawan. 2003. *Pengaruh Sektor Industri Kecil Terhadap Pendapatan di Kota Surabaya*, Fakultas Ekonomi UPN"Veteran" Jatim. Surabaya.
- Mashudi. 2001. *Pengaruh Modal, Pendidikan dan Tenaga kerja* jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi.
- Nopirin. 2000. *Ekonomi Internasional, Edisi Keempat*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Putong, Iskandar. 2003. *Pengantar ekonomi Mikro dan Makro, Edisi Kedua*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rufiani, 1998. *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pada Sektor Industri Kecil Di Jawa Timur*, Fakultas Ekonomi UPN"Veteran" Jatim. Surabaya.
- Rosyidi, Suherman. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salvatore, Dominick, 1994. *Ekonomi Internasional, Edisi Ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Samuelson, Paul. A, dan Nordhaus, William. 1993. *Mikro Ekonomi, Edisi Keenam*, Jakarta: Erlangga.
- , 1995. *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko dan Irawan. 1992. *Ekonomika Pembangunan, Edisi Kelima*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Susanto. 2004. *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Nilai Produksi Pada Industri Kecil Sepatu di Surabaya*, Fakultas Ekonomi UPN"Veteran" Jatim. Surabaya.
- , 2002. *Ekonomika Pembangunan, Edisi Keenam*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Widarjono, Agus. 2005. *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi, Edisi Pertama*, Yogyakarta: